

Motivasi Amerika Serikat Memberikan Sanksi Ekonomi Terhadap Venezuela Tahun 2017-2020

Meinita Triandini^{1*}, Arie Kusuma Paksi²

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

*Email korespondensi: meinitatriandhini@gmail.com

Abstract. *This study aims to explain the causes of the United States imposing economic sanctions on Venezuela. This study uses the political theory of economic sanctions in looking at how the United States can impose economic sanctions on Venezuela. The method used in this research is descriptive qualitative. Where data collection in this study uses library research. Based on the results of this study, it can be seen that the United States as a superpower has the power to determine the course of the global economy. At a time when Venezuela was hit by an economic crisis, the aid that the United States wanted to provide was rejected by Venezuela. The United States then imposed economic sanctions on Venezuela. This research finds that the United States can impose sanctions on any country that threatens its national interests.*

Keywords : *United States of America; Economic Crisis; Economic Sanctions; Venezuela.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab Amerika Serikat memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Venezuela. Penelitian ini menggunakan teori politik sanksi ekonomi dalam melihat bagaimana Amerika Serikat dapat memberlakukan sanksi ekonomi di Venezuela. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan studi Pustaka. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa Amerika Serikat sebagai negara adidaya memiliki power dalam menentukan arah jalannya ekonomi global. Pada saat Venezuela dilanda krisis ekonomi, bantuan yang ingin diberikan oleh Amerika Serikat ditolak oleh Venezuela. Amerika Serikat kemudian memberlakukan sanksi ekonomi bagi Venezuela. Penelitian ini menemukan bahwa Amerika Serikat dapat memberlakukan sanksi terhadap negara manapun yang mengancam kepentingan nasionalnya.

Kata Kunci: *Amerika Serikat; Krisis Ekonomi; Sanksi Ekonomi; Venezuela*

PENDAHULUAN

Amerika Serikat merupakan sebuah negara yang hingga saat ini masih menyandang gelar sebagai negara adidaya. Bukan tanpa alasan Amerika Serikat disebut sebagai negara adidaya. Negara federal ini semenjak Perang Dunia II berakhir memang telah memiliki kekuatan politik, ekonomu, hingga teknologi yang mumpuni. Amerika Serikat pada perkembangannya terus mengembangkan industri dalam negeri, mengembangkan sistem militer dan perekonomiannya. Bahkan Amerika Serikat juga menjadi salah satu negara yang melatarbelakangi terbentuknya organisasi ekonomi internasional, yakni International Monetary Fund, World Trade Organizations, dan World Bank. Sehingga melalui keberhasilan-keberhasilan tersebut, Amerika Serikat kini dikenal dengan negara Super Power. Dimana belum ada negara yang dapat menyaingi Amerika Serikat begitu pula perannya di dalam roda ekonomi dunia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kiprah Amerika Serikat di dalam perekonomian global sangat besar. Sebagai negara yang ada dibalik terbentuknya tiga raksasa organisasi ekonomi internasional, tentunya Amerika Serikat memiliki kuasa dalam menentukan arah kebijakan ekonomi global. Selain itu Amerika Serikat juga menjadi salah satu negara kreditor terbesar dunia yang dapat memberikan pinjaman kepada negara berkembang maupun negara miskin (Hussein 2013). Selain itu Amerika Serikat juga memberikan bantuan maupun pinjaman kepada negara yang dilanda krisis, Salah satunya Venezuela. Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat memang dapat memberikan bantuan maupun

pinjaman kepada Venezuela. Namun nyatanya Amerika Serikat juga dapat mengintervensi negara lain, contohnya melalui pemberlakuan sanksi ekonomi. Salah satu negara yang mendapatkan sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat adalah Venezuela.

Venezuela merupakan salah satu negara yang terletak di Kawasan Amerika Selatan yang memiliki pasokan minyak bumi terbesar di dunia. Sebagai negara yang masih berada di dalam kawasan yang sama dengan Amerika Serikat, tentunya Venezuela masuk ke dalam radar pemberian bantuan maupun pinjaman oleh Amerika Serikat. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa Venezuela merupakan salah satu mitra dagang Amerika Serikat. Sebagai negara penghasil minyak terbesar di dunia, Venezuela Bersama dengan Iran, Irak, Kuwait dan Arab Saudi kemudian membentuk Organization of The Petroleum Exporting Countries (OPEC n.d.).

Pada tanggal 15 Januari 2016, Venezuela kemudian mengumumkan kondisi darurat ekonomi dalam negerinya (Budisatria, Hasibuan, and Dwiputra 2022). Melihat buruknya kondisi dalam negeri Venezuela, masyarakat dan beberapa kelompok kemudian mengadakan aksi demonstrasi. Aksi ini dilakukan masyarakat untuk menuntut Presiden Nicholas Maduro untuk mundur dari jabatannya karena dianggap tidak cakap dalam menangani permasalahan dalam negeri. Aksi demonstrasi ini memakan korban jiwa, sehingga turut menuai kecaman dari berbagai Pihak. Sebagai lanjutan dari tuntutan masyarakat tersebut pada 23 Januari 2019, Ketua Majelis Umum Venezuela, Juan Guaido kemudian diangkat menjadi presiden sementara Venezuela. Pendeklarasian ini nyatanya mendapat dukungan dari berbagai negara, salah satunya Amerika Serikat.

Dalam merespon krisis ekonomi di Venezuela, Amerika Serikat berupaya untuk memberikan bantuan kepada Venezuela meskipun bantuan tersebut pada akhirnya ditolak oleh Presiden Venezuela Nicholas Maduro. Akibat penolakan bantuan tersebut, hubungan Amerika Serikat dan Venezuela kian memburuk. Hal ini juga diikuti dengan keputusan Amerika Serikat yang memberi sanksi terhadap Venezuela. Sanksi tersebut berupa melarang negara sekutu Amerika Serikat melakukan transaksi dalam bentuk apapun termasuk minyak mentah Venezuela, hingga melarang pemberian bantuan terhadap Venezuela (Iskandar 2020).

Penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensi penulis dalam memperkuat argument di dalam tulisan ini. Dalam penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Kadang, Yuniarti dan Rendy Wirawan menyebutkan bahwa pada saat terjadi krisis ekonomi di Venezuela, Amerika Serikat berupaya untuk menyalurkan bantuan melalui USAID. Namun bantuan tersebut ditolak oleh Maduro karena bantuan tersebut dianggap memiliki maksud menggulingkan Maduro. Akibat hal tersebut, Amerika Serikat memberlakukan beberapa sanksi seperti pelarangan transaksi di Amerika Serikat bagi Venezuela, pelarangan transaksi tunai maupun non tunai, pelarangan transaksi jual beli minyak mentah kepada Venezuela, hingga pembekuan asset Venezuela di Amerika Serikat.

Kemudian dalam penelitian dengan judul “Kepentingan Amerika Serikat Terlibat Dalam Konflik Domestik Venezuela Tahun 2019”. Peneliti berargumen bahwa Pada saat terjadi konflik domestic di Venezuela, Terjadi demo oleh kelompok oposisi yang menolak terpilihnya Maduro pada pemilu 2018. Dengan ini Majelis Nasional Venezuela menetapkan Juan Guaido sebagai presiden sementara dan tidak mengakui Maduro. Amerika Serikat memberikan dukungannya terhadap kelompok oposisi ini karena memiliki tujuan yang sama dengan kelompok oposisi untuk menekan Maduro agar dapat mundur dari jabatan presidennya. Karena Maduro dianggap tidak kompeten dan dapat mengganggu kepentingan politik dan ekonomi Amerika Serikat di Venezuela (Iskandar 2020).

Berdasarkan dengan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat alasan dan hal yang melatarbelakangi Amerika Serikat dalam memberlakukan sanksi ekonomi di Venezuela tahun

2017-2020. Mengingat sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Venezuela bertepatan dengan krisis ekonomi yang juga sedang melanda Venezuela. Selain itu, penulis juga akan menganalisa bentuk-bentuk sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat kepada Venezuela dan dampaknya terhadap Venezuela.

Untuk menjelaskan tentang pemberlakuan sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela, maka akan digunakan teori politik sanksi. Sanksi pada dasarnya telah menjadi alat yang digunakan banyak pihak dalam melancarkan praktik diplomasi tanpa menggunakan gertakan militer. Sanksi yang digunakan dalam politik sanksi terbagi atas sanksi ekonomi dan sanksi politik. Penggunaan sanksi ekonomi kian populer dalam beberapa dekade belakangan. Bahkan terhitung sejak tahun 1990, banyak aktor yang telah menjalankan sanksi ekonomi. Seperti Amerika Serikat, Russia, PBB, Uni Eropa, Yunani, Belgia, Jerman, Prancis, Arab Saudi, Spanyol, Jepang, Belanda, MERCOSUR, hingga Tuki. Penggunaan sanksi ekonomi ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan internal maupun eksternal aktor-aktor tersebut.

Teori sanksi ekonomi dapat dijelaskan sebagai pemberhentian kerjasama ekonomi dan keuangan untuk kepentingan kebijakan luar negeri dan keamanan suatu negara. Sanksi yang diberikan dapat bersifat menyeluruh seperti embargo ekonomi, melarang adanya aktivitas komersil yang berkaitan dengan suatu negara, pembekuan aset, pembatasan modal, hingga pengurangan bantuan asing. Sanksi pada dasarnya telah digunakan sebagai alat untuk menyukseskan kebijakan luar negeri suatu negara. Meskipun pada dasarnya sanksi juga termasuk intervensi, namun pemberlakuan sanksi dikenal dengan biaya yang rendah dan minim resiko dibandingkan mendeklarasikan terjadinya perang (Miyagawa 1992).

Menurut William H. Kaempfer (2007), sanksi ekonomi internasional kerap kali digunakan suatu negara atau organisasi internasional untuk memperlihatkan kekuasaan mereka dan untuk memengaruhi pemerintah negara lain tanpa menggunakan campur tangan militer. Penggunaan sanksi ekonomi internasional sebagai salah satu instrument kebijakan luar negeri nyatanya memiliki popularitas yang tinggi, terutama pasca perang dingin. Teori sanksi pada dasarnya merupakan perluasan dari mekanisme preferensi kebijakan di satu negara yang ditransmisikan ke negara lain. Menurut teori ini, sanksi ekonomi dapat berupa sanksi perdagangan layaknya pembatasan ekspor impor, sanksi investasi seperti pembatasan aliran modal ke target, hingga pembekuan aset target.

Bila berbicara mengenai pemberian sanksi kepada suatu negara, maka terdapat beberapa asumsi yang mendasarai mengapa sebuah negara dapat dijatuhi sanksi. Pertama, anggapan bahwa negara pada dasarnya adalah entitas rasional, sehingga negara dapat menganalisis urusan dalam negeri dan urusan luar negeri. Kedua, sanksi ekonomi dapat meningkatkan biaya negara dan memotong hubungan ekonomi dengan negara lain sehingga dapat mengurangi perdagangan lintas batas. Ketiga, negara tidak dapat menjauh dari perdagangan internasional dalam jangka waktu lama. Keempat, masyarakat internasional dapat berhenti menjatuhkan sanksi bila tujuan telah tercapai. Kelima, memberi isyarat kepada negara lain bahwa ketidakpatuhan terhadap tatanan internasional dapat berakibat pada hilangnya hak istimewa yang ditawarkan di masyarakat dunia (Ghodoosi n.d.)

Pemberlakuan sanksi ekonomi di suatu negara tentu dapat berakibat fatal bagi negara target, karena melalui sanksi ekonomi, aktivitas ekonomi negara dapat terhambat. Pada dasarnya, tujuan dibalik pemberlakuan sanksi ekonomi adalah untuk menghalangi, memaksa hingga menghukum subjek internasional yang dapat mengancam kepentingan nasional atau masyarakat internasional. Meskipun pada kenyataannya, sanksi ekonomi kerap digunakan sebagai sarana untuk melancarkan kepentingan

suatu negara yang sifatnya dapat mengancam kedaulatan suatu negara. Penggunaan sanksi ekonomi ini kerap kali disalahgunakan oleh negara-negara yang memiliki posisi kuat di kancah internasional.

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dimana penulis menjelaskan alasan Amerika Serikat memberikan sanksi terhadap Venezuela. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah document based research dengan mengumpulkan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Dalam menganalisis data yang dikumpulkan, penulis menggunakan metode content analysis dengan menganalisis isi dari literatur yang telah dikumpulkan dan dibedah untuk mendapatkan kesimpulan dari masalah yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Amerika Serikat dan Venezuela Sebelum Krisis Ekonomi

Sebelum krisis ekonomi melanda Venezuela, Amerika Serikat dan Venezuela telah menjalin hubungan yang secara resmi terbentuk pada tahun 1835. Hubungan antara Amerika Serikat bermula pada saat Venezuela masih bergabung dengan Federasi Kolombia. Dan hubungan tersebut terus berlanjut ketika Venezuela memutuskan untuk memisahkan diri dari Federasi Kolombia. Amerika Serikat juga telah mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Venezuela pada tanggal 28 Februari 1835 (US Embassy 2022). Hubungan Amerika Serikat dan Venezuela kemudian resmi dijalankan pada tanggal 30 Juni 1835 dan bertepatan dengan dibentuknya perjanjian perdagangan. Perjanjian perdagangan ini berbicara mengenai perdagangan antarnegara khususnya perdagangan minyak dan tambang.

Amerika Serikat memandang bahwa Venezuela memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari sumber daya alam Venezuela yang melimpah, salah satunya sumber daya minyak bumi. Melihat hal tersebut, Amerika Serikat kemudian membentuk pola regional. Pembentukan pola regional ini dilakukan dengan tujuan agar Amerika Serikat tetap menjadi negara besar yang terjamin kebutuhannya (Anandahesa 2020). Contohnya Bolivia, Chile dan Peru akan menjadi negara-negara pemasok kebutuhan mineral Amerika Serikat, serta Ekuador dan Venezuela yang akan menjadi negara pemasok minyak bumi dan gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Amerika Serikat.

Sebagai negara pemasok minyak bumi dan gas alam bagi Amerika Serikat, tentunya hubungan kedua negara tersebut semakin dekat. Hal ini kemudian membawa beberapa perusahaan Amerika Serikat dapat melebarkan sayapnya di kawasan Venezuela, contohnya Chevron. Pada tahun 1997, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton kemudian menyatakan bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Venezuela semakin erat karena memiliki kesamaan komitmen terhadap demokrasi dan akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang (Dailymail 2019).

Hubungan Amerika Serikat dan Venezuela pada masa pemerintahan Presiden Hugo Chavez mengalami keretakan. Hal ini disebabkan oleh Presiden Chavez yang melakukan kunjungan ke Irak dan melanggar larangan penerbangan internasional ke Irak. Meskipun perjalanan Chavez pada saat itu bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar negara anggota OPEC (Whitaker 2000). Namun akibat hal tersebut, hubungan Amerika Serikat dan Venezuela mulai merenggang. Merenggangnya hubungan kedua negara ini juga disebabkan oleh kritik yang diutarakan oleh Chavez terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat pada saat itu, George W. Bush.

Berbagai tuduhan diberikan oleh Chavez terhadap Amerika Serikat. Seperti tuduhan bahwa dibalik kerja sama dan bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat, terdapat keinginan Amerika Serikat untuk menggali informasi mengenai Venezuela yang dapat melemahkan negara tersebut. Venezuela juga turut memelopori penguatan kawasan Amerika Latin dengan memelopori gerakan anti Amerika (Erwin 2008). Melalui gerakan ini, Chavez menyuarakan Gerakan revolusionernya sebagai negara pemimpin di Amerika Selatan dan menentang Amerika Serikat.

Pasca mundurnya Hugo Chavez yang kemudian digantikan oleh Nicholas Maduro, ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela masih berlanjut. Pasalnya Nicholas Maduro dianggap melakukan kecurangan pada saat pemilu. Hal tersebut menyebabkan banyak pihak yang mengecam kemenangan tidak sah Nicholas Maduro tersebut. Amerika Serikat pun menjadi salah satu negara yang melayangkan kecaman tersebut. Di awal era pemerintahan Maduro, krisis ekonomi yang terjadi di Venezuela kian parah. Inflasi yang mencapai angka 1,37% dan menurunnya PDB hingga 35% telah membuat kondisi dalam negeri Venezuela semakin memburuk.

Pada awal pemerintahannya, Nicholas Maduro mengusir atase militer Amerika Serikat atas tuduhan perencanaan pemberontakan di Venezuela. Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Barrack Obama kemudian merespon hal tersebut dengan mengucurkan dana bantuan kemanusiaan terhadap pihak oposisi yang melakukan serangan konspirasi terhadap Nicholas Maduro untuk menggulingkan pemerintahannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengambil alih pendapatan utama Venezuela yakni sektor minyak bumi, meningkatkan masyarakat pro Amerika, dan melemahkan rezim Maduro . Pada tahun 2015, Presiden Barrack Obama mengeluarkan perintah eksekutif yang menyatakan bahwa Venezuela merupakan ancaman keamanan nasional bagi Amerika Serikat.

Terlepas dari dinamika hubungan antar kedua negara tersebut yang dihadapkan dengan beberapa masalah dan konflik, beberapa refleksi juga terlihat dari kedekatan Amerika Serikat dan Venezuela. Hal ini dibuktikan dengan terlaksananya perjanjian kerjasama berupa Kerjasama perdagangan dan investasi, serta kerjasama dalam memerangi produksi dan perdagangan narkoba, hingga pendirian kantor kedutaan di kedua negara tersebut. Melalui Kerjasama dan perjanjian tersebut dapat memperdalam hubungan antar negara. Hubungan antar negara dapat dilihat melalui bagaimana kedua negara mengambil tindakan, Kerjasama ekonomi, hingga pemberian bantuan.

Krisis Venezuela dan Penolakan Terhadap Bantuan Amerika Serikat

Minyak bumi merupakan komoditi ekspor utama yang dimiliki oleh Venezuela. Hal ini disebabkan karena Venezuela memiliki pasokan minyak bumi yang dapat menjadi sumber pembiayaan utama bagi kebutuhan dalam negeri. Dengan kenyataan bahwa Venezuela merupakan negara penghasil minyak bumi, membawa Venezuela menjadi salah satu pendiri dari OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries). Venezuela kemudian membuka peluang kepada perusahaan asing untuk bergabung dalam industri minyak bumi. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang tertarik dengan penawaran tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa Venezuela memiliki sumber cadangan minyak bumi yang sangat besar. Bahkan Venezuela memiliki salah satu ladang minyak bumi terbesar di dunia, yakni Orinoco Belt. Venezuela kemudian menyepakati Kerjasama dengan Amerika Serikat atas ekspor minyak mentah. Semenjak tahun 1993 hingga tahun 2018, Venezuela telah mengekspor minyak mentah ke Amerika Serikat sebanyak 11.739.084 barrel.

Pada tahun 2014, harga minyak bumi turun drastis dari angka \$107 per barel menjadi \$62 per barel (Kadang and Wirawan 2022). Penurunan harga minyak bumi ini disebabkan karena adanya peningkatan produksi shale oil. Sehingga menyebabkan penumpukan minyak mentah karena negara-negara tujuan ekspor Venezuela beralih ke shale oil karena harga jual yang lebih terjangkau

dibandingkan minyak mentah. Ketergantungan Venezuela akan sektor minyak bumi ini membawa kerugian yang besar. Hingga pada tahun 2016, pemerintah Venezuela mengumumkan krisis ekonomi telah resmi terjadi. Hal ini disebabkan oleh hiperinflasi, turunnya harga minyak bumi, turunnya PDB, hingga hutang yang melonjak. Bahkan inflasi yang terjadi di Venezuela mencapai angka 400%. Melihat bahwa Venezuela mengalami krisis yang serius, Presiden Venezuela Nicholas Maduro kemudian melakukan reformasi mata uang Bolivar menjadi Bolivar Soberano (Lumintosari 2021). Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa inflasi yang terjadi dapat diredam. Namun hal ini nyatanya Kembali membawa Venezuela masuk ke dalam masalah yang lebih serius.

Krisis ekonomi yang terjadi di Venezuela kemudian membawa berbagai permasalahan muncul, seperti kelangkaan pangan, timbulnya masalah kesehatan, hingga permasalahan mengenai emigrasi. Kelangkaan pangan terjadi akibat pemerintah yang hanya fokus dalam memperbaiki dan mengembangkan sektor migas, sedangkan sektor agrikultur tidak dikembangkan secara maksimal. Sehingga pada saat terjadinya krisis, pasokan pangan dalam negeri tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat berdampak pada munculnya masalah kesehatan. Selain itu, sejalan dengan semakin parahnya krisis ekonomi dan politik yang terjadi, banyak masyarakat yang kemudian meninggalkan Venezuela untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negara tetangga, seperti Brazil dan Colombia. Permasalahan ini kemudian dapat berdampak pada keamanan internasional.

Disamping krisis ekonomi, krisis politik juga dialami oleh Venezuela. Hal ini dikarenakan kepercayaan masyarakat yang memudar kepada Presiden Maduro. Korupsi yang tidak teratasi, kecurangan dalam pemilu hingga kegagalan dalam menyelesaikan krisis ekonomi, membawa rakyat Venezuela melaksanakan demonstrasi untuk menurunkan Nicholas Maduro dari jabatannya sebagai presiden. Kondisi dalam negeri Venezuela kian memanas, terutama ketika Juan Guaido yang didukung oleh pihak oposisi memproklamasikan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela.

Melihat krisis yang terjadi di Venezuela, banyak negara yang kemudian menawarkan bantuan kepada Venezuela. Salah satunya Amerika Serikat. Amerika Serikat berupaya menyalurkan bantuan kepada Venezuela melalui United States Agency for International Development (USAID). Bentuk bantuan yang disalurkan Amerika kepada Venezuela berupa makanan, minuman, obat-obatan hingga kebutuhan sehari-hari. Namun bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat tersebut mendapat penolakan dari pemerintah Venezuela. Hal ini disebabkan karena Presiden Nicholas Maduro telah menyatakan bahwa Venezuela merupakan negara yang bebas dari intervensi Amerika Serikat (Kadang and Wirawan 2022).

Menyikapi bantuan yang akan disalurkan oleh Amerika Serikat, Presiden Nicholas Maduro kemudian memberlakukan penutupan perbatasan laut dengan Brazil, dan perbatasan darat dengan Karibia. Selain itu, penutupan akses jalan raya juga dilakukan di perbatasan Venezuela dan Colombia. Dengan diberlakukannya hal tersebut, maka penyaluran bantuan oleh Amerika Serikat maupun dari negara lain menjadi terhambat. Meskipun bantuan Amerika Serikat melalui USAID ditolak oleh Presiden Maduro, namun Amerika Serikat tetap menyalurkan bantuan kepada masyarakat Venezuela yang mengungsi ke negara tetangga seperti Brazil dan Colombia.

Akibat penolakan bantuan yang disalurkan oleh Amerika Serikat kepada Venezuela, kemudian membawa hubungan kedua negara ini kian memanas. Amerika Serikat kemudian memberlakukan sanksi kepada Venezuela pada tahun 2017 yang tertuang dalam Executive Order (EO). Dimana sanksi tersebut berupa pelarangan transaksi jual beli minyak bumi kepada Venezuela oleh warga Amerika Serikat, pembatasan ekspor minyak bumi ke negara-negara sekutu Amerika Serikat, pelarangan

transaksi tunai maupun non tunai kepada Venezuela, hingga pembekuan asset milih Venezuela yang berada di Amerika Serikat.

Dengan diberlakukannya sanksi ekonomi tersebut, Venezuela menelan kerugian yang besar. Akibat pembatasan ekspor minyak bumi yang berlaku, jumlah penjualan minyak mentah Venezuela dari 464 Juta Barel jatuh ke angka 308 Juta Barel (Qorina 2020). Amerika memberlakukan sanksi ini kepada Venezuela bukan tanpa alasan. Selain karena penolakan bantuan yang ingin disalurkan Amerika Serikat kepada Venezuela, Amerika Serikat juga ingin menunjukkan kekuatan Amerika Serikat dalam mengendalikan sektor ekonomi dalam hal minyak mentah. Hal ini juga digunakan oleh Amerika Serikat untuk melemahkan pemerintah Venezuela yang dipimpin oleh Presiden Nicholas Maduro.

Respon Amerika Serikat Terhadap Penolakan Bantuan Oleh Venezuela

Pemberlakuan sanksi ekonomi terhadap Venezuela dilakukan Amerika Serikat bukan tanpa alasan. Penolakan bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh Amerika Serikat dalam menyikapi krisis ekonomi dan hiperinflasi yang terjadi di Venezuela menjadi salah satu alasan penting dibalik dijatuhkannya sanksi ekonomi. Selain alasan tersebut, terdapat beberapa alasan lain dibalik pemberlakuan sanksi ini. Amerika Serikat memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Venezuela pada tahun 2017 terutama karena kekhawatiran tentang situasi politik dan hak asasi manusia di negara tersebut, serta erosi institusi demokrasi. Sanksi tersebut dijatuhkan sebagai tanggapan atas tindakan yang diambil oleh pemerintah Venezuela di bawah Presiden Nicolás Maduro, yang dianggap Amerika Serikat tidak demokratis dan merupakan ancaman bagi stabilitas regional.

Alasan lain dibalik pemberlakuan sanksi adalah akibat terjadinya krisis konstitusional pada tahun 2017, dimana Presiden Maduro menyerukan pemilihan Majelis Konstituante, yang akan memiliki kekuasaan untuk menulis ulang konstitusi negara. Amerika Serikat dan beberapa negara lain menganggap langkah ini sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan melemahkan institusi demokrasi. Selain itu, penindasan oposisi politik oleh Pemerintah Venezuela dituduh menekan dan memenjarakan lawan politik, termasuk pemimpin oposisi dan anggota Majelis Nasional. Tindakan tersebut dinilai melanggar hak asasi manusia dan prinsip demokrasi.

Venezuela telah menghadapi krisis ekonomi parah yang ditandai dengan hiperinflasi, kekurangan bahan pokok, dan penurunan standar hidup. Amerika Serikat percaya bahwa salah urus ekonomi dan dugaan korupsi dalam pemerintahan Venezuela berkontribusi pada krisis ini. Pengenaan sanksi dimaksudkan untuk menekan pemerintah Venezuela untuk mengatasi masalah ini. Dan mendorong reformasi demokrasi (Budisatria et al. 2022).

Amerika Serikat memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Venezuela pada tahun 2017 terutama karena kekhawatiran tentang situasi politik dan hak asasi manusia di negara tersebut, serta erosi institusi demokrasi. Sanksi tersebut dijatuhkan sebagai tanggapan atas tindakan yang diambil oleh pemerintah Venezuela di bawah Presiden Nicolás Maduro, berupa penolakan bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh Amerika Serikat. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela pada tahun 2017 terutama ditujukan untuk membatasi akses pemerintah Venezuela ke pasar keuangan internasional dan membatasi kemampuan mereka untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi tertentu (Rebecca and Brown 2022). Sanksi tersebut antara lain:

1. Sanksi Keuangan

Amerika Serikat memberlakukan pembatasan pada kemampuan pemerintah Venezuela dan entitas milik negaranya untuk mengakses pasar keuangan Amerika Serikat. Ini berarti bahwa warga negara Venezuela hingga pejabat pemerintahan dilarang mengeluarkan utang baru di pasar Amerika

Serikat dan dilarang melakukan transaksi keuangan tertentu yang melibatkan bank Amerika Serikat.

2. Pembekuan Aset

Amerika Serikat membekukan aset yang dimiliki di Amerika Serikat milik pejabat pemerintah Venezuela tertentu dan individu yang dituduh melakukan korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah orang-orang tersebut mengakses aset mereka dan menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Pembekuan aset ini dilakukan melalui kantor Pengendalian Aset Asing milik Amerika Serikat yang akan mengatur sanksi dalam hal penyitaan atas properti asing dan pembekuan aset. Sebagai hasilnya, seluruh Aset pejabat Venezuela dibekukan dan seluruh pejabat Amerika Serikat dan penduduk Amerika Serikat diberi larangan untuk berhubungan dengan pejabat tersebut.

3. Sanksi sektor minyak

Amerika Serikat menerapkan pembatasan transaksi yang melibatkan minyak Venezuela, yang merupakan sumber pendapatan penting bagi negara. Langkah-langkah ini termasuk pembatasan impor minyak Venezuela dan pembatasan transaksi dengan perusahaan minyak milik negara Venezuela, PdVSA. Sanksi ini mulai berlaku pada tahun 2017

4. Kontrol ekspor

Amerika Serikat memberlakukan kontrol ekspor pada barang dan teknologi tertentu yang dapat digunakan untuk tujuan militer, untuk mencegahnya mencapai pemerintah Venezuela dan berpotensi digunakan melawan rakyat Venezuela atau negara tetangga.

Bentuk-bentuk sanksi tersebut juga telah termuat dalam executive order (EO) atau perintah eksekutif khusus yang mengesahkan sanksi ekonomi terhadap Venezuela pada tahun 2017.

1. Executive Order 13808, menyebutkan bahwa larangan kepada Pemerintah Venezuela maupun perseorangan untuk bertransaksi di Amerika Serikat maupun bertransaksi dengan warga negara Amerika Serikat. EO ini diberlakukan pada tanggal 25 Agustus 2017. Dan memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi terhadap individu dan entitas yang terlibat dalam tindakan yang merusak proses demokrasi, berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia, atau terlibat dalam korupsi di Venezuela. Juga dapat mengesahkan langkah-langkah untuk membatasi akses pemerintah Venezuela ke pasar keuangan Amerika Serikat.
2. Executive Order 13827, berisi bahwa seluruh transaksi yang memiliki kaitan dengan pembiayaan dan transaksi oleh penduduk Amerika Serikat atau di dalam Amerika Serikat, bahwa tiap mata uang digital, token digital dan koin digital, yang dikeluarkan atas nama Pemerintah Venezuela dilarang aktif sejak 9 Januari 2018.
3. Executive Order 21 Mei 2018, berisi bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh penduduk Amerika Serikat atau orang yang tinggal di Amerika Serikat dilarang atas pemberian hutang piutang dengan pemerintah Venezuela.
4. Executive Order 13850, menyebutkan bahwa seluruh properti dan kepentingan properti yang ada di Amerika Serikat, yang akan datang ke Amerika Serikat, atau yang akan berada di tangan atau dimiliki oleh penduduk Amerika Serikat dimana orang berikut diblokir dan tidak boleh ditransfer, dibayar, ditarik atau sebaliknya ditangani.

Sesuai dengan perintah eksekutif tersebut, terbit larangan warga Amerika Serikat untuk terlibat dalam transaksi tertentu yang melibatkan utang baru yang diterbitkan oleh pemerintah Venezuela, termasuk obligasi dan bentuk surat utang lainnya. Pembatasan ini membatasi kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan dana melalui pasar keuangan (Kadang and Wirawan 2022). Selain itu terdapat pembatasan transaksi ekuitas, dimana melarang warga Amerika Serikat untuk terlibat dalam transaksi

tertentu yang melibatkan sekuritas ekuitas yang diterbitkan oleh pemerintah Venezuela, seperti saham atau saham. Langkah ini bertujuan untuk membatasi investasi di pemerintah Venezuela dan entitas terkaitnya.

Larangan pembayaran dividen juga turut diperintahkan dalam Perintah Eksekutif tersebut. Dimana terdapat larangan atas pemerintah Venezuela membagikan dividen atau keuntungan kepada entitas yang dikendalikannya. Langkah ini bertujuan untuk mencegah pemerintah dari keuntungan finansial sementara negara menghadapi krisis ekonomi. Serta adanya pembatasan transaksi dan memblokir transaksi tertentu yang terkait dengan sektor minyak Venezuela (Saputra 2017).

Setelah diberlakukannya sanksi ekonomi pada tahun 2017 sebagai respon atas penolakan bantuan oleh pemerintah Venezuela dan sebagai usaha melemahkan rezim Maduro, Amerika Serikat memperluas sanksi yang diberlakukan kepada Venezuela. Pada tahun 2019, Amerika Serikat beserta Australia, Jepang, Israel dan Uni Eropa, dan 17 negara barat mendukung dan mengakui Juan Guaido sebagai Presiden Venezuela sementara. Amerika Serikat dibawah Presiden Donald Trump mendukung penuh Juan Guaido dan memiliki tujuan untuk menjatuhkan rezim Maduro. Serta pemberian sanksi yang lebih luas kepada Venezuela. Sanksi yang diperluas pada tahun 2019 tersebut bertujuan untuk menambah tekanan ekonomi pada pemerintahan Venezuela agar dapat menekan dan memukul mundur pemerintahan Maduro.

Keinginan Amerika Serikat dalam melemahkan rezim Maduro dan pengakuan atas Juan Guaido sejalan dengan keinginan pihak oposisi. Sehingga Amerika Serikat mendukung penuh perlawanan dari pihak oposisi yang mendesak diadakannya pemilu ulang. Amerika Serikat juga menjanjikan adanya bantuan dana sebesar \$200 Juta kepada pihak oposisi. Upaya yang dilakukan Amerika Serikat dalam mendukung pihak oposisi ini bukan dilakukan tanpa alasan. Namun upaya ini dilakukan Amerika Serikat untuk memnuhi kepentingan ekonomi Amerika Serikat.

Hal ini dikarenakan, keberpihakan Amerika Serikat pada pihak oposisi dapat berdampak pada kedekatan Amerika Serikat dengan Pemerintah Venezuela. Selain itu, bantuan yang disalurkan oleh Amerika Serikat juga merupakan salah satu upaya Amerika Serikat untuk mengambil alih kendali perusahaan minyak Amerika Serikat. Selain itu, kekhawatiran Amerika Serikat terhadap menyebarnya pengaruh sosialis Venezuela, juga menjadi alasan Amerika Serikat menekan pemerintahan Maduro melalui pemberian sanksi tersebut.

Sanksi ekonomi yang dikenakan pada Venezuela oleh Amerika Serikat pada dasarnya diberlakukan sebagai tanggapan atas situasi politik dan hak asasi manusia di Venezuela, serta erosi institusi demokrasi. Tujuan sanksi adalah untuk menekan pemerintah Venezuela dan melemahkan rezim Nicholas Maduro, mendorong reformasi demokrasi, hingga mengubah kendali atas kebutuhan minyak Amerika Serikat melalui pemerintahan Venezuela yang sejalan dengan Amerika Serikat.

Namun efektivitas dan dampak sanksi ekonomi sering menjadi bahan perdebatan. Walaupun maksud dari sanksi tersebut adalah untuk mengatasi masalah di Venezuela, sanksi tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, termasuk potensi dampak negatif pada masyarakat umum. Sanksi dapat menyebabkan kesulitan ekonomi, memengaruhi hubungan perdagangan, dan menciptakan tantangan bagi warga negara biasa. Pertimbangan geopolitik yang lebih luas di kawasan, seperti kekhawatiran tentang stabilitas regional dan pengaruh aktor eksternal, mungkin juga menjadi aktor dalam keputusan untuk menjatuhkan sanksi. Selain itu, Amerika Serikat telah menyatakan dukungannya terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi secara global, dan sanksinya selaras dengan nilai-nilai tersebut.

KESIMPULAN

Sebagai negara adidaya dan memiliki industry yang berkembang dengan pesat, Amerika Serikat tentu telah menjadi negara super power. Pasalnya, Bahkan Amerika Serikat juga menjadi salah satu negara yang melatarbelakangi terbentuknya organisasi ekonomi internasional, yakni International Monetary Fund, World Trade Organizations, dan World Bank. Dan berperan besar dalam laju roda perekonomian dunia. Amerika Serikat yang dapat memberikan bantuan dan pinjaman terhadap negara berkembang, telah mengambil kesempatan untuk membantu Venezuela yang sebelumnya telah dilanda krisis ekonomi berkepanjangan sejak era Presiden Hugo Chavez. Meskipun pada dasarnya Venezuela merupakan negara yang kaya akan sumber daya minyak bumi dan gas alam. Namun karena kurangnya pemanfaatan dan diikuti dengan korupsi oleh pemerintah, akibatnya Venezuela selangkah masuk ke dalam jurang krisis ekonomi.

Selain itu, pergantian mata uang bolivar, krisis politik dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah juga menjadi factor lain dari krisis ekonomi di Venezuela. Sehingga semakin memperparah kondisi dalam negeri Venezuela. Sehingga Amerika Serikat menyalurkan bantuan melalui USAID yang kemudian ditolak oleh Venezuela. Akibatnya Amerika Serikat kembali memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Venezuela. Sanksi ini termuat dalam Executive Order nomor 13808 yang berisi sanksi-sanksi terhadap perekonomian Venezuela. Mulai dari control ekspor impor, pelarangan atas transaksi apapun antara Venezuela dan Amerika Serikat, hingga larangan pembayaran deviden.

Pemberlakuan sanksi ekonomi terhadap Venezuela pada dasarnya adalah Langkah Amerika Serikat untuk menekan pemerintah Venezuela yang berada dibawah rezim Maduro, mendorong reformasi demokrasi, memenuhi kepentingan Amerika Serikat, dan menguasai minyak mentah Venezuela. Sanksi ekonomi ini diberlakukan semenjak tahun 2017 yakni pada masa pemerintahan Nicholas Maduro. Sanksi ini masih terus diperpanjang. Pada tahun 2019, sanksi ekonomi kembali diperluas untuk memastikan kepentingan Amerika Serikat di Venezuela tidak terancam oleh pemerintahan Nicholas Maduro.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandaheesa, K. (2020). *Kemunculan Krisis Ekonomi Venezuela Di Akhir Pemerintahan Hugo Chavez*. Skripsi. Program Studi Hubungan Internasional. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Budisatria, T., Hasibuan, B. H., & Dwiputra, R. H. (2022). Hiperinflasi Venezuela: Dampaknya Terhadap Posisi Strategis Amerika Serikat-Venezuela. *PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora (e-Journal)*, 27(1), 63. <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v27i1.2897>
- Kadang, CI., & Wirawan, R. (2022). Keterlibatan Amerika Serikat Dalam Krisis Venezuela Pada Masa Pemerintahan Nicolas Maduro. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 10(1), 231–244.
- Dailymail. (2019). *Venezuela and US : a Timeline of Their Relations as Nicholas maduro Battles for Power*. <https://google.com/www.dailymail.co.uk/news/fb6628461/amp/venezuela-united-states-timelinerelations.html>
- Erwin. (2008). Washington Balas mengusir Duta Besar Bolivia. *Tempo.Co*. diakses pada 13 Juni 2021, 21.13 WIB
- Ghodoosi, F. (n.d.). *The Sanctions Theory : A Frail Paradigm For International Law*. London: *Yale Law School*.

- Hussein, S. (2013). Eksistensi Amerika Serikat Sebagai Kekuatan Global. *Global & Policy*, 1(1), 84–91. <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jgp/article/view/2013>
- Iskandar, F. O. (2020). Kepentingan Amerika Serikat Terlibat Dalam Konflik Domestik Venezuela Tahun 2019. *Jom Fisip*, 8, 1–15.
- Kaempfer, W. H., & Lowenberg, A. D. (1988). The Theory of International Economic Sanctions: A Public Choice Approach. *American Economic Review*, 78(4), 1304–1306. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=4495367&site=ehost-live&scope=site>
- Kaempfer, W. H., & Lowenberg, A. D. (2007). Chapter 27 The Political Economy of Economic Sanctions. *Handbook of Defense Economics*, 2(06), 867–911. [https://doi.org/10.1016/S1574-0013\(06\)02027-8](https://doi.org/10.1016/S1574-0013(06)02027-8)
- Lumintosari, F. R. (2021). Intervensi asing pada krisis Venezuela: AS, Rusia, dan Uni Eropa. *Jurnal Politikom Indonesia*, 6(2), 13–23. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/5601>
- Malaysianto, A. S. (2020). Krisis Politik Venezuela Di Era Nicolas Maduro Tahun 2013-2019. Program Studi Hubungan Internasional. *Universitas Jember*.
- Miyagawa, M. (1992). What are Economic Sanctions? *Do Economic Sanctions Work?*, 6–15. https://doi.org/10.1007/978-1-349-22400-5_2
- OPEC. (n.d.). *Member Countries*. https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/25.htm
- Qorina, C. (2020). Upaya Amerika Serikat Dalam Mencapai Kepentingan Ekonomi-Politik di Venezuela Pada Masa Pemerintahan Nicolas Maduro. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 2(2), 74–91. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v2i2.24>
- Rebecca, & Brown, P. (2022). *Venezuela: Background and U.S. Relations*. London: Openbooks
- Saputra, A. M. (2017). Krisis Ekonomi dan Tuntutan Demokrasi di Venezuela. In *Skripsi. Ekonomi Internasional*. Universitas Kristen Petra.
- US Embassy. (2022). *U.S. Relations With Venezuela*. <https://www.state.gov/u-s-relations-with-venezuela/>
- Whitaker, B. (2000). US furious at Venezuelan leader's visit to Saddam. *The Guardian*.